

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

*Agency Theory* adalah manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dan hal ini menciptakan konflik potensial atas kepentingan. Hubungan agen muncul ketika satu orang individu atau lebih yang disebut pemilik (*principals*) mempekerjakan individu lain atau organisasi yang disebut agen untuk melaksanakan pekerjaan dan kemudian mendelegasikan otorisasi pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan agen yang utama adalah : (1) antara pemegang saham dan manajer serta (2) antara manajer dan pemberi kredit. (Brigham, 2001).

Hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan pada agen tersebut (Brigham & Houston, 2006). Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan mendorong manajer untuk tidak memaksimalkan usahanya (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks perusahaan, masalah keagenan yang dihadapi investor mengacu pada kesulitan investor untuk memastikan bahwa dananya tidak disalahgunakan oleh manajemen perusahaan untuk mendanai kegiatan yang tidak menguntungkan (Wulandari, 2011).

Menurut Jensen & Meckling (1976), penyebab konflik antara manajer dan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencarian dana dan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan. Dengan teori keagenan maka dapat menjelaskan fenomena masalah keagenan di Indonesia khususnya di dalam struktur kepemilikan. Shleifer & Vishny (1997) menjelaskan bahwa manajer mengendalikan perusahaan dan masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer.

## 2.2 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap sebuah perusahaan. Tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan, motivasi pemilik dan kreditor *corporate governance* dalam proses insentif yang membentuk motivasi manajer (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Pemilik akan membuat berbagai strategi untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan, setelah strategi ditentukan maka yang dilakukan selanjutnya ialah akan mengimplementasi strategi dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan.

Menurut Mei Yuniati (2016), menyatakan bahwa struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan manajemen, institusional, dan kepemilikan pemerintah, dan struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham. Jahera & Auburn (1996) memberi pendapat bahwa struktur kepemilikan (*ownership structure*) adalah struktur kepemilikan saham, yaitu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insiders*) dengan jumlah saham yang

dimiliki oleh investor. Atau dengan kata lain, struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya, suatu perusahaan diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh para pemegang saham (*principals*).

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan mengimplikasikan adanya pengorbanan dalam penggunaan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan profit yang diperoleh, di mana kepemilikan yang tersebar akan mengurangi insentif bagi manajer untuk memaksimalkan profit. La Porta *et al.*, (1998) menyatakan, dalam penelitian terbaru, struktur kepemilikan dihubungkan dengan kerangka legal. Pada negara yang perlindungan terhadap investornya lemah, pemusatan kepemilikan menjadi pengganti dari perlindungan legal. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas dapat mengharapkan untuk memperoleh pengembalian investasi mereka.

Pemusatan kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan dengan meminimumkan *agency cost* (Classens *et al.*, 1999) dan (Jensen & Meckling, 1976). Namun, pemusatan kepemilikan tersebut juga mengandung biaya potensial. Bukti empiris pada negara berkembang menunjukkan bahwa pemusatan kepemilikan, khususnya keluarga yang juga mengendalikan perusahaan, kemungkinan dapat menimbulkan mudahnya perilaku meminjam, sehingga akan meningkatkan tingkat hutang perusahaan (Alba, Classens & Djankov, 1998).

### 2.3 Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan laporan keuangan dapat didefinisikan dengan penyajian sebuah informasi yang diperlukan dimana bertujuan sebagai berlangsungnya pasar modal efisien secara optimal. Ada tiga konsep pengungkapan yang umum diusulkan yaitu Hendriksen (2002) :

#### a) *Adequate Disclosure* (pengungkapan cukup)

Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

#### b) *Fair Disclosure* (pengungkapan wajar)

Pengungkapan tidak wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

#### c) *Full Disclosure* (pengungkapan penuh)

Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang digunakan secara relevan. Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik.

Di Indonesia, pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan oleh emiten atau perusahaan publik ditetapkan oleh BAPEPAM-LK dalam Peraturan Nomor Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang berjumlah 73 item dan dihitung melalui indeks Wallace. Peraturan ini merupakan pedoman dan memberikan penjelasan tentang isi, struktur, dan persyaratan dalam penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang terstandarisasi dengan prinsip-prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure*). Sehingga dapat memberikan kualitas

informasi keuangan kepada pengguna serta harus di disampaikan kepada emiten ataupun perusahaan publik, baik kepada masyarakat maupun BAPEPAM-LK.

Penelitian yang dilakukan, menggunakan rumus berdasarkan hitungan indeks wallace. Untuk dapat mengukur tingkat kelengkapan laporan keuangan, dapat di hitung dengan berdasarkan index of disclosure quality methodology, seperti index wallace, yang seperti berikut;

**Rumus Indeks Wallace =  $n/k \times 100\%$**

Yang berketerangan :

N= jumlah item yang diungkapkan perusahaan

K=jumlah item yang seharusnya di ungkapkan

(Dibiyantoro, 2011) menyatakan bahwa, smakin banyak item yang diungkapkan oleh perusahaan, maka semakin banyak pula angka indeks yang diperoleh perusahaan. Perusahaan dengan angka indeks tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik pengungkapan secara komperhensif dibandingkan perusahaan lain.

Adapun kriteria kelengkapan pengungkapan dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Memberi skor pengungkapan secara dikotomi, apabila perusahaan mengungkapkan suatu item, maka diberi nilai 1, dan apabila perusahaan tidak mengungkapkan item tersebut maka di beri nilai 0.
2. Skor yang dimiliki perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.
3. Menghitung indeks kelengkapan *mandatory disclosure financial statement* dengan membagi skor yang di peroleh perusahaan dengan jumlah semua butir pengungkapan yang seharusnya di penuhi.

## 2.4 Metode Penelitian Terdahulu

Donnelly & Mulcahy (2008) melaporkan bukti yang jelas bahwa pengungkapan sukarela meningkat dengan jumlah direktur yang tidak berekspre di dewan direksi. Perusahaan yang memiliki ketua tidak berekspre membuat pengungkapan sukarela lebih besar daripada perusahaan lain. Selain itu, hasil mereka menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengungkapan laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Abdullah (2008), menemukan bahwa kepemilikan institusional merupakan faktor penting yang dapat membantu perusahaan untuk tampil secara efektif, dia juga mendapati perusahaan tersebut cenderung diaudit oleh Big 4 jika tingkat kepemilikan institusional meningkat.

Huafang & Jianguo (2007) menyimpulkan bahwa ada hubungan terbalik antara kepemilikan utama dan pengungkapan informasi. Samaha *et al.*, (2012), menguji dampak dari serangkaian atribut tata kelola perusahaan yang komprehensif mengenai tingkat keterbukaan *corporate governance* secara sukarela di Mesir. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan pemerintahan lebih rendah bagi perusahaan dengan tingkat dualitas dan konsentrasi pemilikan yang lebih tinggi yang diukur dengan kepemilikan pemegang saham dan meningkat dengan proporsi direktur independen di dewan direksi dan juga ukuran perusahaan.

Mulyadi (2011), kelengkapan adalah suatu bentuk kualitas. Meskipun makna kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda, banyak penelitian yang menggunakan *indeks of disclosure methodology* mengemukakan bahwa pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai potensial dari isi

laporan keuangan. Dalam artian lain, kualitas informasi laporan keuangan berkaitan dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

## **2.5 Pengaruh Variable Independen terhadap Variabel Dependen**

### **2.5.1 Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan**

Alves (2012), meneliti hubungan antara variabel kepemilikan struktur dan pengungkapan laporan keuangan di Indonesia, Portugal dan Spanyol. Hasil mereka menunjukkan bahwa penentu utama pengungkapan laporan keuangan adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan peluang, kinerja organisasi, kompensasi dewan dan kehadiran pemegang saham besar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2008), Agustina (2006) dan Simanjuntak (2004) memperoleh hasil bahwa kepemilikan saham pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Sementara Motavassel *et al.*, (2013) menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara kepemilikan pemerintah terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, peneliti mengusulkan hipotesis:

**H<sub>1</sub> : Kepemilikan Pemerintah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan**

### **2.5.2 Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan**

Kumala Dewi (2008), menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pengungkapan laporan

keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa bila kepemilikan institusional meningkat menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan semakin lengkap. Shleifer & Vishny (1986) dan Bathala *et al.*, (1994), Sujoko & Soebiantoro (2007) dan Rahmawati & Triatmoko (2007) meneliti bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan. Akan tetapi berdasarkan penelitian dari Animah & Ramadhani (2009), Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengusulkan hipotesis:

**H<sub>2</sub> : Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.**

### **2.5.3 Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan**

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengatasi konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial sehingga dapat mensejajarkan kepentingan pemilik dengan manajer. Midiastuty & Machfoedz (2003), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kualitas pengungkapan laporan keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa bila kepemilikan manajerial meningkat maka luas pengungkapan laporan keuangan juga akan lengkap.

Kumala Dewi (2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pengungkapan laporan keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa bila kepemilikan manajerial meningkat menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan semakin lengkap. Jensen & Meckling

(1976) mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh penting terhadap insentif manajerial dan nilai perusahaan. Mereka berargumen bahwa kepemilikan saham manajerial dapat mengurangi insentif manajer untuk mengkonsumsi kemewahan, atau terlibat dalam perilaku yang tidak memaksimalkan nilai lainnya.

Berdasarkan penjelasan, maka penulis mengusulkan hipotesis:

**H<sub>3</sub>: Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan**

#### **2.5.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Laporan keuangan**

Tingkat profitabilitas bertujuan untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengukur profitabilitas perusahaan, penelitian saat ini menggunakan *Return on Asset*, rasio ini menggambarkan bahwa laba bersih yang dapat dicapai setiap total asset perusahaan (Munawir, 2001). Semakin besar profitabilitas maka akan semakin luas dalam pengungkapan laporan keuangan. Sebaliknya, semakin kecil profitabilitas maka akan semakin sempit dalam pengungkapan laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan Binsar S (2004) memperoleh bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan, namun penelitian yang dilakukan Dewi Agustina (2006) dan Kumala Dewi (2008) belum berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengusulkan hipotesis:

**H<sub>4</sub>: Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan**

### **2.5.5 Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan**

Latar belakang masuknya variabel kinerja perusahaan didorong oleh suatu alasan sederhana yaitu bahwa perusahaan dengan status yang berbeda akan memiliki stakeholder yang berbeda, sehingga tingkat kelengkapan pengungkapan yang harus dilakukan berbeda Fitriany (2001) dan Dewi Agustina (2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Agustina & Nugraheni (2006) memperoleh hasil bahwa kinerja perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan, namun secara teori dengan status perusahaan yang baik akan semakin luas pula pengungkapan laporan keuangan perusahaan.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan Frasti (2016), menyatakan bahwa kinerja perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.

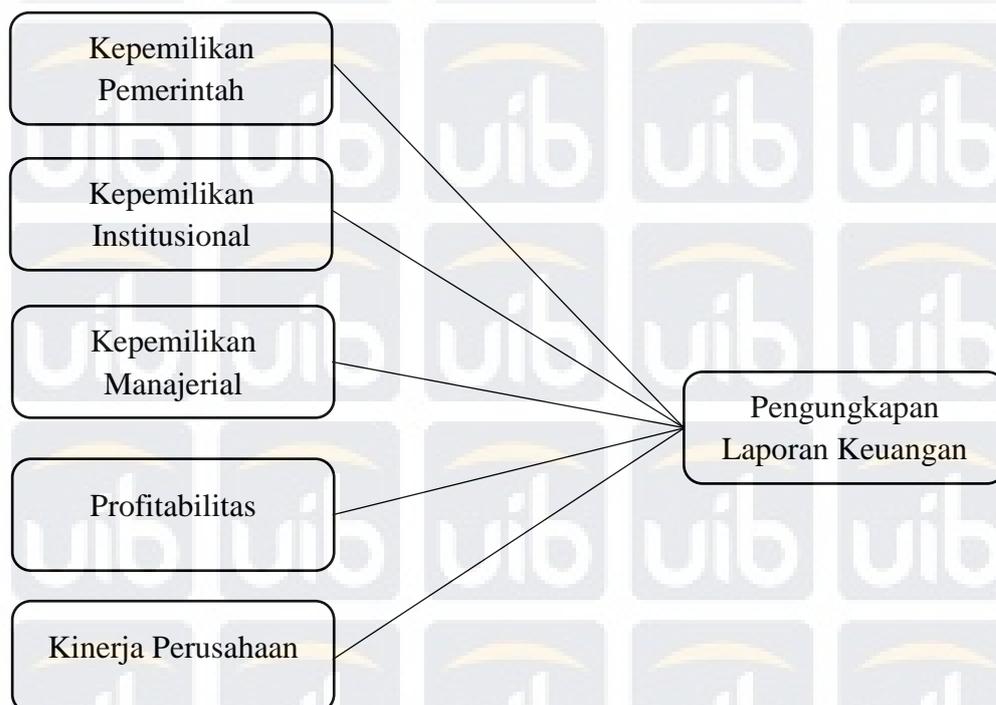
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengusulkan hipotesis:

**H<sub>5</sub> : Kinerja Perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.**

## 2.6 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesa

Model penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian frasti (2016).

Model Penelitian yang digambarkan oleh peneliti dapat dilihat pada gambar berikut ini:



*Gambar 1.* Model penelitian analisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan laporan keuangan.

H1: Kepemilikan Pemerintah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan

H2: Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.

H3: Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan

H4: Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan

H5: Kinerja Perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.